

# MANAJEMEN PEMERINTAHAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KARAWANG DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA DI KABUPATEN KARAWANG

Oleh :

Evi Priyanti, S.IP., M.Si  
[evi.priyanti@staff.unsika.ac.id](mailto:evi.priyanti@staff.unsika.ac.id)

Dini Sri Istiningdias, S.S., M.Hum  
[dini.sri@staff.unsika.ac.id](mailto:dini.sri@staff.unsika.ac.id)

## ABSTRAK

Tak dapat dipungkiri Kabupaten Karawang adalah salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki banyak potensi wisata, baik wisata alam maupun wisata sejarah, seperti Grand-Canyon Ciomas, Gunung Sanggabuana, Makam Syech Quro dan potensi wisata lainnya. Untuk meningkatkan daya tarik para wisatawan ke Karawang, Pemerintah Kabupaten Karawang akan membangun objek wisata perkotaan, wisata kuliner, wisata tangan asli Karawang seperti Kabupaten Lain. Dalam mengembangkan pariwisata harus ada keterlibatan semua pihak baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Wawancara dilakukan terhadap informan yang di tentukan secara *purposive sampling*. Peneliti mengambil informasi yang berasal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori yang di dasarkan pada empat indikator yakni : *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengendalian).

**Kata Kunci:** Manajemen Pemerintah, Potensi Wisata, Kabupaten Karawang

### 1. Latar Belakang Penelitian

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Sementara tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang tertuang dalam Peraturan Bupati No.36 Tahun 2008.

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang adalah :

**“terwujudnya Kabupaten Karawang sebagai daerah tujuan wisata Nasional dan Internasional berbasis wisata alam dan budaya lokal “.**

Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkanlah Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan destinasi wisata daerah berbasis wisata alam dan budaya lokal

2. Mendorong peran serta masyarakat, dunia usaha dan pemerintahan daerah untuk pemasaran pariwisata di tingkat Nasional dan Internasional yang berdaya saing
3. Membangun dan mengembangkan industri pariwisata yang berciri khas budaya lokal serta menggerakkan kemitraan usaha dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat lokal
4. Membangun kelembagaan kepariwisataan daerah

Untuk merealisasikan tujuan tersebut banyak usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola sektor-sektor unggulan yang mampu memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan warga masyarakat di Kabupaten Karawang. Salah satu yang dikelola oleh pemerintah adalah sektor pariwisata yaitu baik obyek wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Pemerataan pembangunan dalam otonomi daerah yang menekankan adanya keseimbangan antara pusat dan daerah.

Keberadaan pariwisata sangatlah mendukung adanya pembukaan lapangan usaha, yang juga menjadi penggerak pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang, seperti perdagangan, restoran, souvenir, dan hotel.

Berdasarkan data dari sifonews mengemukakan bahwa menurut Kepala Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang :

Desakan agar eksekutif untuk membentuk Perbup Wisata kembali Selain itu juga dikemukakan oleh masyarakat yakni salah seorang pengelola objek wisata Curug Cigeuntis mengatakan bahwa:

Hal ini mencuat setelah kabar 6 warga desa Pakisjaya di amankan Polres Karawang dikarenakan melakukan pungli di tempat wisata pantai Pakis Jaya. Menurut keterangan Kepala Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru Kab. Karawang, Jaji Maryono, Potensi wisata di Karawang selatan sangat luar biasa untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi tidak di maksimalkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Karawang. Lebih jauh Jaji menambahkan Karawang mempunyai destinasi wisata yang sangat eksotis di wilayah Karawang selatan tepatnya di desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru, akan tetapi potensi wisata disana tidak dimaksimalkan dengan baik ( Sumber : <https://sifonews.com/kabupaten-karawang-butuh-perbup-pengelolaan-wisata/> diakses Maret 2018)”

“Dengan tidak adanya payung hukum dirinya merasa was was dengan adanya pungutan masuk objek wisata. Sedangkan objek wisata tersebut membutuhkan pengelolaan. Dirinya mendukung jika Pemda Karawang membentuk satu aturan terkait pengelolaan wisata yang ada di Kabupaten Karawang. Kami mendukung dan berharap Pemda Karawang sesegera mungkin membuat aturan terkait pengelolaan Pariwisata, “Kami mendukung dan berharap Pemda Karawang sesegera mungkin membuat aturan terkait pengelolaan Pariwisata.” ( Sumber (<https://sifonews.com/kabupaten-karawang-butuh-perbup-pengelolaan-wisata/> diakses Maret 2018))”

Uraian-uraian diatas merupakan dasar penulis untuk mengkaji tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang sebagai badan yang melaksanakan tugas untuk membantu

penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan objek wisata dan kebudayaan di Kabupaten Karawang, dalam penulisan penelitian yang berjudul “Manajemen Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang dalam Mengembangkan Pariwisata di Kabupaten Karawang.

Uraian-uraian diatas merupakan dasar penulis untuk mengkaji tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang sebagai badan yang melaksanakan tugas untuk membantu penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan objek wisata dan kebudayaan di Kabupaten Karawang, dalam penulisan penelitian yang berjudul “Manajemen Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang dalam Mengelola Wisata Sejarah Monumen Kebulatan Rengasdengklok di Kabupaten Karawang.”

### **1.1 Identifikasi Masalah**

1. Mengenai sumber daya yang tersedia belum maksimal sehingga dibutuhkan pelatihan / sosialisasi atau SDM dikembangkan atau dikelola.
2. Kurangnya kerjasama yang baik dari 3 komponen manajemen pemerintahan yakni pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Karawang

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil beberapa permasalahan yang akan dirumuskan untuk mempermudah penulis dalam mengkaji masalah yang diangkat dalam penulisan ini. Rumusan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana Perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana Pengorganisasian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Karawang?
3. Bagaimana Pelaksanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang dalam mengembangkan Pariwisata di Kabupaten Karawang?
4. Bagaimana Pengawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Karawang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian memberikan kejelasan arah dalam pelaksanaan penelitian. Dalam suatu penelitian dikenal dua macam tujuan, yaitu Tujuan Obyektif dan Tujuan Subyektif. Tujuan Obyektif adalah tujuan yang berasal dari penelitian itu sendiri. Sedangkan Tujuan Subyektif adalah tujuan yang berasal dari penulis. Adapun Tujuan Obyektif dan Tujuan Subyektif dari penelitian ini adalah :

- a. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pemerintah dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Karawang

Untuk mengetahui tindak lanjut tata kelola yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan potensi wisata di Kabupaten Karawang.

#### b. Tujuan Subyektif

Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan, dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek Ilmu Pemerintahan, khususnya manajemen Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang dalam mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Karawang.

Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pemerintahan agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

## 2. Tinjauan Pustaka

Kerangka pemikiran diterapkan sebagai dasar dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta hubungannya dengan masalah yang telah dirumuskan. Kerangka pemikiran yang menjadi acuan usulan penelitian ini adalah teori manajemen pemerintah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang khususnya Bidang Pariwisata berwenang mengelola wisata Monumen Kebulatan Tekad untuk mewujudkan tujuan wisata yang baik agar terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut Stoner dalam Wijayanti (2008: 1) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Follet dalam Wijayanti (2008: 1) mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

Dari teori dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa, manajemen pada dasarnya adalah keseluruhan proses dari berbagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan orang lain atau bersama orang lain mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.

Kata pemerintah dan pemerintahan berasal dari satu suku kata yang sama yaitu “Perintah” yang artinya “sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan.” Dengan demikian, maka ada unsur pemaksaan melalui pesan. Misalnya dalam bentuk kebijakan, aturan, himbauan dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka pemerintah harus ada legitimasi yang menyebabkannya memiliki kewenangan dan kekuasaan.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi/arti pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai Suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu

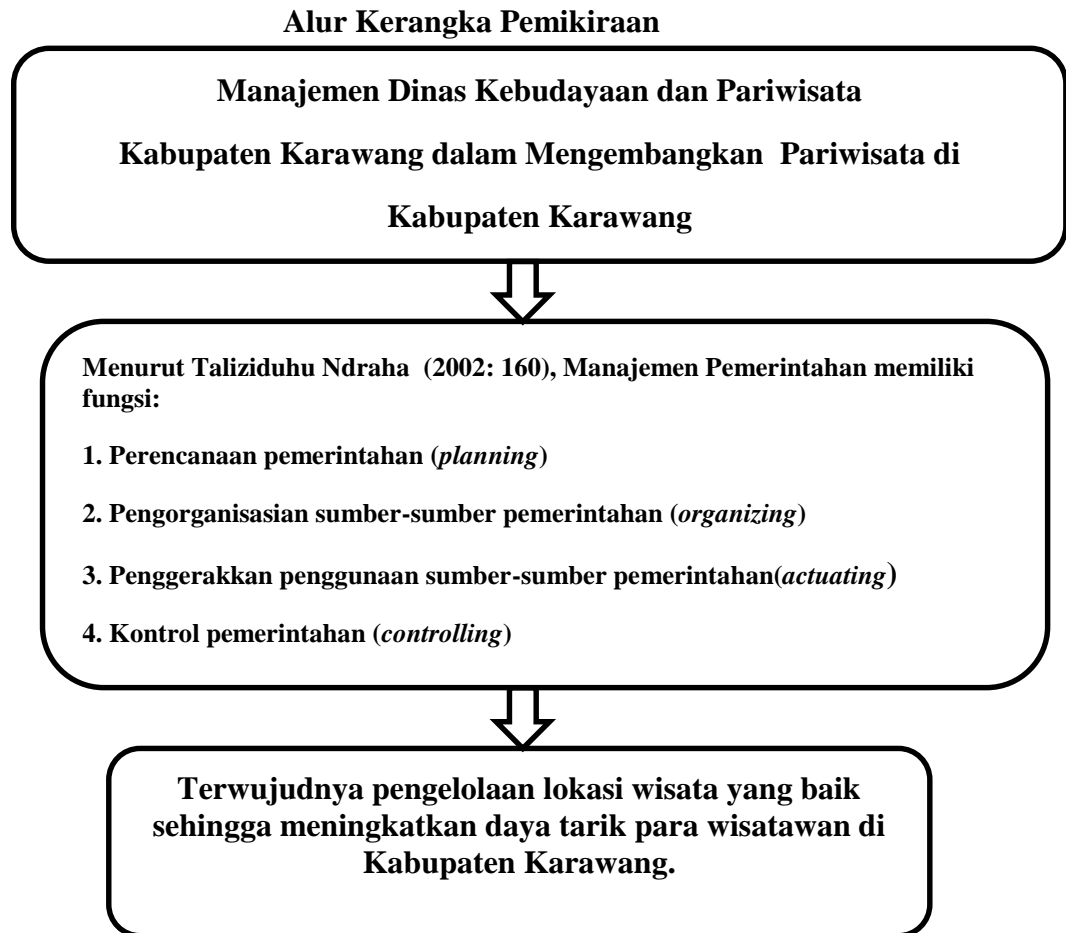
badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Rasyid (2000 : 59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok Pemerintah ada 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2011: 160) Ruang lingkup manajemen pemerintahan terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen:

1. **Perencanaan pemerintahan (*planning*)**, Sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. Perencanaan harus mampu menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan, memprediksi apa yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang sesuai prakiraan atau analisis yang dilakukan yang dapat di pertanggungjawabkan dan menjadi penjabar dari tahap-tahap yang dikehendaki.
2. **Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan (*organizing*)**, Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar manajemen. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan menyusun semua sumber yang disyaratkan dalam rencana, terutama sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga kegiatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dengan pengorganisasian, orang-orang dapat disatukan dalam satu kelompok atau lebih untuk melakukan berbagai tugas. Tujuan pengorganisasian adalah membantu orang-orang untuk bekerjasama secara efektif dalam wadah organisasi atau lembaga
3. **Penggerakan penggunaan sumber-sumber pemerintahan (*actuating*)**, Untuk menggerakan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
4. **Kontrol (*controlling*)**,  
 Untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Sebagai alur berfikir manajemen pemerintah dalam pengelolaan wisata sejarah yaitu sebagai berikut :



Sumber : olahan Peneliti, 2017

**Gambar 1. 1 Alur Kerangka Pemikiran**

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1 . Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2010 : 42).

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan tujuan, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, juga akan mempermudah pengembangan data yang diperoleh. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian empiris, penelitian ini berbasis pada ilmu normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati

bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 : 47).

Penelitian ini mengkaji mengenai Manajemen Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang dalam mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Karawang.

### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode penulisan yang menghasilkan data deskriptif analisis yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 250).

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

1. Lokasi penelitian yang akan digunakan agar dalam penelitian ini diperoleh hasil seperti yang diharapkan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang.
2. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April 2018.

### **3.3 Variabel yang diamati/diukur**

Variabel yang diamati adalah mengenai potensi wisata di Kabupaten Karawang sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan daya tarik wisata ke Kabupaten Karawang sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang.

### **3.4 Model yang digunakan**

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian empiris adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian adalah data yang diperoleh terutama dari penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di masyarakat (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 : 156).

Dalam hal ini data primer penulis diperoleh langsung dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Karawang melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau juga bisa disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang pertama (Soerjono Soekanto, 2010 : 12), sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang meliputi :

#### **1) Bahan Primer**

- a. Bahan primer merupakan bahan mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan terdiri dari :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang  
kepariwisataanPeraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No 14  
Tahun 2016 tentangpedoman pariwisata lanjutan

## 2) Bahan Sekunder

Bahan sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian yang relevan terkait penelitian ini, termasuk diantaranya skripsi, thesis, disertasi, jurnal-jurnal , kamus , dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 3.5 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

#### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan antara lain : Data primer merupakan teknik pengumpulan dengan melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung pada objek yang diteliti. Dilakukan dengan cara :

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari dokumen, buku-buku, jurnal-jurnal atau bahan pustaka lainnya dalam bentuk tertulis berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Pengamatan atau observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung obyek yang ada di lapangan tentang segala sesuatu mengenai obyek penelitian. Dalam hal ini pengamatan atau observasi dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang.
- c. Wawancara, merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi secara langsung guna memperoleh data, baik lisan maupun tertulis atas sejumlah keterangan dan data yang diperlukan. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara ( *interviewer* ) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai ( *interviewee* ) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Lexy J. Moleong, 2007 : 135)



## **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah yang diperoleh dari studi kepustakaan. Menurut Sutopo, analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan dengan verifikasinya (H.B. Sutopo, 2002 : 94-96).

### 1) Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan dari catatan data yang diperoleh di lapangan. Dalam menyusun ringkasan tersebut, peneliti memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan, dan membuang hal-hal yang tidak penting.

### 2) Sajian Data

Penyajian data merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, serta mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian. Sajian data dapat meliputi berbagai jenis gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan, dan tabel sebagai pendukung narasinya.

### 3) Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan bisa dipertanggungjawabkan. Verifikasi dapat berupa kegiatan yang dilakukan dengan mengembangkan ketelitian, misalnya dengan berdiskusi. Ketiga komponen analisis data di atas membentuk prosesnya berlangsung dalam bentuk siklus.

## **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Perencanaan Pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Karawang Perencanaan, yaitu dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. Perencanaan harus mampu menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan, memprediksi apa yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang sesuai prakiraan atau analisis yang dilakukan yang dapat di pertanggungjawabkan dan menjadi penjabar dari tahap-tahap yang dikehendaki.

Hal ini merujuk pada perencanaan dan penyusunan langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Karawang.

Hasil penemuan peneliti di lapangan bahwa dalam peraturan atau regulasi tentang kepariwisataan di Kabupaten Karawang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang pengelolaan kepariwisataan yakni Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016, kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati No 41 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Pariwisata yakni Bapak Dadan pada tanggal 8 Oktober 2018 di Dinas Pariwisata dan Kabupaten Karawang mengatakan bahwa pada tahun 2015 dibentuk Peraturan Daerah yang inisiatif Rencana Induk Pengembangan pariwisata di Kabupaten Karawang yang kemudian disahkan pada Tahun 2016 yakni RIPDA No 3 Tahun 2016 yakni ada 7 titik pengembangan pariwisata yakni Pantai Pakis, Candi Jiwa, Pantai Tanjung Baru, Tugu Kebulatan Rengasdengklok, Makam Syekh Quro, Green Canyon, Kampung Budaya.

Kemudian mengenai sumber daya yang tersedia belum maksimal sehingga dibutuhkan pelatihan / sosialisasi atau SDM dikembangkan atau dikelola. Kemudian ada sosialisasi SAPTA PESONA yakni sadar wisata dalam Usaha Kepariwisata.

Sedangkan langkah dalam mengembangkan pariwisata ada perbaikan infrastruktur yakni ada pintu masuk atau gerbang di 7 titik diprioritaskan dalam anggarannya. Pengorganisasian Pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Karawang Fungsi pengorganisasian berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian pun harus direncanakan.

Fungsi pengorganisasian yang dalam bahasa inggrisnya adalah *organizing* berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya.

Pengorganisasian tentu berbeda dengan organisasi. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen dan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah yang statis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokkan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) dan penentuan hubungan-hubungan.

Menurut Kepala Seksi Bidang Pariwisata yakni Bapak Dadan yang diwawancarai pada tanggal 8 Oktober 2018 mengatakan bahwa dalam pengorganisasian ada tiga bidang yakni bidang destinasi pariwisata, bidang kebudayaan, bidang kompetensi SDM.

Penggerakan Pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Karawang

Penggerakan (*actuating*) yaitu untuk menggerakan organisasi atau instansi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakan seluruh sumber daya dalam pemerintahan yang ada dalam organisasi atau instansi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.

Dalam pelaksanaan pengembangan pemasaran pariwisata Tahun 2011-2015 dijelaskan dalam tabel berikut :

Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah kunjungan wisatawan per tahun	323.402	459.826	419.628	428.895	4.427.348
2.	Keikutsertaan dalam pameran pariwisata (kali)	6	6	6	5	8

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karawang

Dalam tabel diatas dapat terlihat bahwa peningkatan jumlah kunjungan ke obyek wisata dari tahun 2011 hingga 2015 dari ke tahun ke tahun mengalami peningkatan dikarenakan jumlah kunjungan yang datang ke obyek wisata alam ( Gunung dan Pantai) , obyek wisata budaya( Situs Candi Jiwa/Situs Batujaya) dan obyek wisata sejarah ( Monumen Rawagede dan Tugu Proklamasi Rengasdengklok) setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan sehingga berdampak kepada peningkatan pendapatan asli daerah.

Dalam hal penggerakan yakni ada koordinasi dengan dinas atau instansi lain dalam pengembangan di destinasi wisata di tujun titik yang di priorotaskan tersebut. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang membentuk Forum kelompok penggerak pariwisata Kabupaten Karawang. Pembentukan Forum Kelompok Penggerak pariwisata (KOMPEPAR) Kabupaten Karawang.

KOMPEPAR mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan motivasi masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Karawang, serta meningkatkan kemampuan anggota.
- b. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam menata pelayanan dan kebutuhan persinggahan wisatawan berbagai Daerah Tujuan Wisata yang ada di Kabupaten Karawang
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam upaya pengembangan kepariwisataan
- d. Menggallakan usaha-usaha pencegahan ekses yang mungkin timbul sebagai aibat pengembangan pariwisata dana tau membatasi pengaruh tersebut serta meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi akibat negatif kegiatan pariwisata.
- e. Meningkatkan kebersihan dan ketertiban lingkungan
- f. Memanfaatkan dan meningkatkan potensi objek wisata serta pelayanan jasa pariwisata Pengawasan Pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Karawang
- g. Fungsi pengendalian (*controlling*) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.
- h. Dalam hal pengawasan, dibentuk mitra kelompok pengelola wisata untuk mengawasi bagaimana pariwisata di Kabupaten Karawang dikembangkan. Selain itu juga antara pemerintah, masyarkat dan swasta harus ada kerjasama yang baik dalam mengelola pariwisata di Kabupaten Karawang karena dengan adanya kerjasama yang baik maka akan meningkatkan pariwisata di Kabupaten Karawang lebih baik lagi.

#### 4. Penutup

##### a. Simpulan

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan mengenai Manajemen Pemerintah dalam Pengembangan wisata di Kabupaten Karawang bahwa dari perenncaanaan terdapat regulasi yang jelas dalam pengembangan wisata tersebut yakni di prioritaskan di 7 titik terlebih dahulu. Dalam dimensi pengorganisasian juga terdapat pembagian tugas yang jelas yakni ada tiga bidang dalam yang terdapat di bidang pariwisata. Dalam dimensi pelaksanaan pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Karawang . Dalam dimensi pengawasan dibentuk

koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Karawang.

### **b. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai manajemen pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Karawang, peneliti ingin memberikan saran yang diharapkan bisa membantu peningkatan pengelolaan kawasan wisata agar dapat menjadi kawasan wisata yang layak dikunjungi baik oleh wisatawan domestic maupun wisatawan asing.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirullah. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- Effendi, Sofian dan Tukiran , 2012. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Gamal Suwanto, SH, 1997 . *Dasar-Dasar Pariwisata*. Andi Publishing
- Hasibuan, Malayu S.P..1995. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.
- \_\_\_\_\_ 1996, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Kedua, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- \_\_\_\_\_ 2009. *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : Bumi Akasara
- Kartodirdjo, Sartono. (1982), *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif* . Jakarta:Gramedia.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Nasution. 1996, *Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif*. Bandung : Tarsito
- Pamudji, 1985. *Perbandingan pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ratminto & Winarsih.S.Atik. 2012. *Manajemen Pelayanan*.Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Ratminto & Winarsih.S.Atik. 2012. *Manajemen Pelayanan*.Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan. 25
- Septi Winarsih, Atik & Ratminto. 2012. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung; Alfabeta
- \_\_\_\_\_ 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung; Alfabeta
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Suryaningrat, Bayu . 1990. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Syaukani, Affan Gaffer, Ryas Rasyid. M,2000. Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Taliziduhu Ndraha. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Bagian satu. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Terry, George R., 1993, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Terry dan Leslie. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*, Penerjemah: G.A. Ticoalu. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wijayanti, Irine Diana Sari, 2008 , *Manajemen*, Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.
- Yoeti, Oka, A. (2006) *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung, Angkasa.

**Dokumen-dokumen**

- Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desentralisasi
- Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No 14 Tahun 2016 tentang pedoman pariwisata lanjutan